

Faktor Penyebab Korupsi: Analisis Internal, Eksternal, dan Upaya Internal

Iwan Ridwan Paturochman *¹

Nathania Tiara Putri ²

Taufik Imam Hidayat ³

Humaysi Camila Hilda Elzen ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Siliwangi

*e-mail : iwanridwan@unsil.ac.id, 243403111041@student.unsil.ac.id,
243403111042@student.unsil.ac.id, 243403111050@student.unsil.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak serius pada pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab korupsi dari perspektif internal dan eksternal, serta mengevaluasi strategi pemberantasan yang telah diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber akademik dan regulasi, serta analisis kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi sifat tamak, gaya hidup konsumtif, lemahnya integritas moral, serta kepribadian gelap. Faktor eksternal terkait dengan birokrasi yang berbelit, lemahnya pengawasan, monopoli kekuasaan, serta budaya permisif masyarakat. Strategi pemberantasan korupsi perlu mengintegrasikan pendekatan struktural dan individual, melalui penguatan penegakan hukum, reformasi birokrasi, pendidikan integritas, serta partisipasi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya antikorupsi membutuhkan komitmen kolektif dan kebijakan yang konsisten untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: *Korupsi, Faktor internal, Faktor eksternal, Pemberantasan, Studi kasus*

Abstract

Corruption is a multidimensional problem that has serious impacts on social, political, and economic development in Indonesia. This article aims to analyze the causes of corruption from internal and external perspectives, and evaluate the eradication strategies that have been implemented. The research method used is a literature study from various academic and regulatory sources, as well as an analysis of the sting operation (OTT) case at the Ministry of Manpower in 2025. The results show that internal factors include greed, a consumptive lifestyle, weak moral integrity, and a dark personality. External factors are related to convoluted bureaucracy, weak oversight, monopoly of power, and a permissive culture in society. The strategy to eradicate corruption needs to integrate structural and individual approaches, through strengthening law enforcement, bureaucratic reform, integrity education, and public participation. This article concludes that anti-corruption efforts require collective commitment and consistent policies to achieve clean and integrated governance.

Keyword: *Corruption, Internal factors, External factors, Eradication, Case studies.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik korupsi telah merusak kepercayaan publik, melemahkan lembaga pemerintahan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi berdasarkan laporan Transparency International. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya (Klitgaard, 1998; Treisman, 2000) menekankan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat kombinasi antara monopoli kekuasaan, diskresi tinggi, dan lemahnya akuntabilitas. Di sisi lain, penelitian psikologi menyoroti aspek kepribadian dan nilai individu sebagai faktor yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, artikel ini berusaha mengisi

celah penelitian dengan menggabungkan analisis internal (individu) dan eksternal (sistem) serta meninjau kasus nyata yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis kasus. Studi literatur dilakukan dengan menelaah sumber akademik, jurnal internasional, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga internasional terkait isu korupsi. Analisis kasus difokuskan pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat Kementerian Ketenagakerjaan pada Agustus 2025. Kasus ini dipilih karena relevan dengan isu struktural dan individual yang menjadi fokus artikel ini.

Menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan demi keuntungan pribadi. Robert Klitgaard (1998) menyatakan bahwa korupsi dapat dijelaskan dengan formula: $C = M + D - A$ (Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan merangkum informasi untuk menemukan pola dan hubungan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kebusukan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Definisi ini sejalan dengan pandangan lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan Transparency International.

Faktor internal penyebab korupsi mencakup aspek psikologis dan moral individu. Kesenakahan, gaya hidup konsumtif, lemahnya integritas, dan rendahnya komitmen moral menjadi pemicu utama. Penelitian oleh Arifin (2000) dan Tanner dkk. (2022) menunjukkan bahwa individu dengan moral disengagement tinggi cenderung menjustifikasi perbuatan koruptif. Selain itu, nilai hedonisme dan kekuasaan lebih dominan pada individu yang rentan melakukan korupsi.

Faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan. Korupsi lebih mudah terjadi dalam sistem birokrasi yang berbelit, minim transparansi, serta lemahnya rule of law. Menurut Svensson (2005), regulasi yang panjang membuka peluang praktik suap. Di Indonesia, budaya permisif yang menghargai kekayaan tanpa mepedulikan asal-usulnya memperkuat praktik korupsi. Faktor desentralisasi tanpa pengawasan juga meningkatkan risiko elite capture (Shah, 2006).

Strategi pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan multidimensi. Pertama, penegakan hukum yang konsisten dengan memperkuat lembaga independen seperti KPK. Kedua, reformasi birokrasi dengan digitalisasi pelayanan publik dan e-procurement (World Bank, 2020). Ketiga, pendidikan integritas dan kampanye antikorupsi sejak dini (Tanner dkk., 2022). Keempat, partisipasi masyarakat melalui mekanisme whistleblowing system dan keterbukaan informasi. Upaya-upaya ini harus dijalankan secara simultan agar efektif dalam jangka panjang.

Pada Agustus 2025, KPK melakukan OTT terkait pemerasan dalam pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini memerangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama 10 orang lainnya. Modus yang digunakan adalah memperlambat penerbitan sertifikasi untuk memaksa perusahaan membayar sejumlah uang.

Analisis menunjukkan bahwa kasus ini dipicu oleh faktor struktural berupa regulasi kompleks, lemahnya SOP, dan pengawasan internal yang lemah. Faktor individual berupa penyalahgunaan jabatan dan rendahnya integritas pejabat turut memperburuk situasi. Dampaknya meliputi kerugian finansial, hambatan operasional perusahaan, hingga turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hasil analisis memperkuat teori Klitgaard (1998) yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam menekan korupsi. Studi kasus menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya persoalan moral individu, tetapi juga kelemahan sistemik yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Pemberantasan korupsi yang hanya menitikberatkan pada penindakan hukum terbukti tidak cukup, melainkan perlu pendekatan preventif melalui reformasi kelembagaan dan perubahan budaya masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan Olken & Pande (2012) serta Treisman (2000).

KESIMPULAN

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang lahir dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keserakahan, lemahnya integritas, serta gaya hidup konsumtif yang mendorong individu untuk mencari keuntungan pribadi. Faktor eksternal berupa birokrasi yang rumit, lemahnya pengawasan, dan budaya permisif masyarakat turut memperbesar peluang terjadinya korupsi.

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan struktural yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan teori Klitgaard yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat monopoli, diskresi tinggi, dan minim akuntabilitas.

Oleh karena itu, strategi pemberantasan korupsi harus menasar aspek individu dan kelembagaan.

Analisis kasus OTT Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan membuktikan bagaimana regulasi yang kompleks, SOP yang lemah, dan rendahnya integritas pejabat menciptakan praktik pemerasan yang merugikan perusahaan dan masyarakat. Kasus ini menggambarkan dampak nyata korupsi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk memberantas korupsi diperlukan pendekatan multidimensi. Penegakan hukum yang konsisten, reformasi birokrasi berbasis digital, serta pendidikan integritas sejak dini merupakan langkah penting yang harus dijalankan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik melalui keterbukaan informasi dan sistem whistleblowing juga sangat krusial untuk menekan praktik korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi hanya bisa diberantas melalui sinergi antara individu, lembaga negara, dan masyarakat. Komitmen kolektif sangat dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Apabila strategi ini dilakukan secara konsisten, maka cita-cita mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi dapat diwujudkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Iwan Ridwan Paturochman, S.H, M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah atas segala arahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan sepanjang proses penulisan artikel ini.

Terima Kasih juga disampaikan kepada tim peneliti dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Dukungan dan kontribusi semua pihak telah memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2000). *Korupsi dalam perspektif moral*. Jakarta: LP3ES.
- Jain, A. K. (2001). Corruption: A review. *Journal of Economic Surveys*, 15(1), 71–121. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133>
- Klitgaard, R. (1998). International cooperation against corruption. *Finance & Development*, 35(1), 3–6. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf>
- Olken, B. A., & Pande, R. (2012). Corruption in developing countries. *Annual Review of Economics*, 4, 479–509. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917>

- Shah, A. (2006). Corruption and decentralized public governance (World Bank Policy Research Working Paper No. 3824). World Bank. <https://documents.worldbank.org/curated/en/153481468177556563/pdf/wps3824.pdf>
- Svensson, J. (2005). Eight questions about corruption. *Journal of Economic Perspectives*, 19(3), 19–42. <https://doi.org/10.1257/089533005774357860>
- Tanner, C., Linder, S., & Sohn, M. (2022). Does moral commitment predict resistance to corruption? *PLOS ONE*, 17(1), e0262201. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262201>
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org>
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235541600116631094>
- Zhang, X., & Wang, X. (2017). Effects of perceived descriptive norms on corrupt intention: The mediating role of moral disengagement. *Asian Journal of Social Psychology*, 20(4), 257–265. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12191>
- Detikcom. (2025, August 23). Alasan KPK jerat Wamenaker Noel cs dengan pasal pemerasan. <https://www.detik.com>
- ANTARA. (2025, August 23). Wamenaker Immanuel Ebenezer jadi tersangka pemerasan OTT KPK. <https://www.antaranews.com>
- CNN Indonesia. (2025, April 14). Pengertian korupsi menurut ahli, penyebab, dan contohnya. <https://www.cnnindonesia.com>